

BPKH *News*

**Memperkuat Sinergi:
Audiensi BPKH dengan
Kementerian Haji
dan Umrah Indonesia**

Hal 08

**Lombok
Pulau Seribu Masjid**

Hal 30

**BPKH Pastikan
Kawal Danantara
dalam Pembiayaan
Kampung Haji di Arab Saudi**

Hal 23

**Menata Ulang Regulasi
Demi Amanah Umat:
Pandangan Acep Jayaprawira
soal Revisi UU Keuangan Haji**

Hal 13

**MENGUATKAN AMANAH
MEMBANGUN SINERGI**



Haji Makin Transparan Dan Mudah



Dapatkan hadiah dan promo menarik untuk
#Hajilebihmudah

Cek saldo dan pertumbuhan nilai
manfaat kamu hanya di **BPKH Apps!**

Promo Bank untuk #Hajilebihmudah

bpkh.go.id



PELINDUNG
Fadlul Imansyah,
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI

Ahmad Zaky,
Sekretaris Badan BPKH RI

PENANGGUNG JAWAB
Demmy R Budiawan,
Kepala Divisi Komunikasi Strategis
BPKH RI

PEMIMPIN REDAKSI
Ricki Syahroni Putra,
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

STAF REDAKSI
Yusuf Kadhafi

ALAMAT REDAKSI
Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No. Kav. 18,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para pembaca yang budiman, di tengah semangat transformasi dan kolaborasi yang terus tumbuh, edisi kali ini kami hadirkan dengan tema besar “Menguatkan Amanah, Membangun Sinergi” Melalui berbagai inisiatif strategis, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga amanah dana haji sekaligus memperluas manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Langkah kolaboratif BPKH bersama Danantara Indonesia menjadi sorotan utama. Sinergi ini membuka peluang baru bagi penguatan ekosistem haji global mulai dari pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi hingga pengelolaan investasi strategis BPKH Limited di luar negeri. Upaya ini bukan hanya untuk menciptakan tata kelola haji yang lebih profesional dan efisien, tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Edisi ini juga menyoroti komitmen BPKH dalam menjaga prinsip Dana Haji Aman, Adil, dan Abadi. Melalui berbagai forum nasional dan internasional, BPKH meneguhkan peran pentingnya sebagai pengelola dana umat yang tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada nilai kemaslahatan dan keberlanjutan.

Tak ketinggalan, kami mengangkat pula inovasi digital yang memudahkan perjalanan ibadah umat Islam dunia melalui aplikasi Nusuk, platform resmi dari Pemerintah Arab Saudi yang menjadi bagian dari Saudi Vision 2030. Aplikasi ini memungkinkan jemaah untuk mengurus visa, akomodasi, hingga bimbingan ibadah dalam satu genggaman.

Melalui rangkaian artikel di edisi ini, kami berharap pembaca dapat melihat bahwa pengelolaan keuangan haji bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian dari perjalanan besar menuju kemandirian dan kemajuan umat.

Selamat membaca, semoga setiap langkah menuju Tanah Suci senantiasa diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



**PERKUAT EKOSISTEM HAJI,
BPKH DAN DANANTARA JAJAKI
KOLABORASI STRATEGIS**

1

**UANG MUKA HAJI RP 2,7 TRILIUN:
KOMITMEN ATAU TANTANGAN
PENGELOLAAN?**

2



**BPKH PERKUAT EKOSISTEM HAJI DAN
UMRAH LEWAT KERJA SAMA DENGAN
DITJEN PENGEMBANGAN EKSPOR
NASIONAL**



**PENYULUH AGAMA: UJUNG TOMBAK
PENCERAHAN UMAT, MITRA STRATEGIS
BPKH DALAM LITERASI KEAGAMAAN**

5



**BPKH TEGUHKAN KOMITMEN
DANA HAJI AMAN, ADIL, DAN
ABADI**

7



**8 MEMPERKUAT SINERGI:
AUDIENSI BPKH DENGAN
KEMENTERIAN HAJI DAN
UMRAH INDONESIA**



**MOMENTUM BARU PENATAAN
HAJI: HARAPAN DI BALIK
KEMENTERIAN HAJI DAN
UMRAH**

9

**KULIAH UMUM UIN JAKARTA:
BPKH RI & KEMENTERIAN
HAJI DAN UMRAH
DORONG TRANSFORMASI
PENYELENGGARAAN HAJI
YANG BERKELANJUTAN DAN
BERKEADILAN**

4 11

**REVISI UU PENGELOLAAN
KEUANGAN HAJI MASUK
PROLEGNAS 2025**

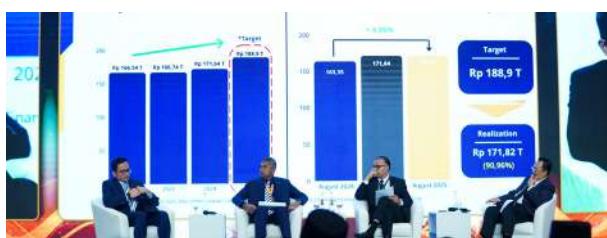
12





13

MENATA ULANG REGULASI
DEMI AMANAH UMAT:
PANDANGAN ACEP
JAYAPRAWIRA SOAL REVISI
UU KEUANGAN HAJI



19

DANA HAJI TERUS
BERTUMBUH: TANTANGAN
DAN PELUANG
MEMPERLUAS INVESTASI
EKOSISTEM HAJI GLOBAL



BPKH PASTIKAN KAWAL DANANTARA
DALAM PEMBIAYAAN KAMPUNG HAJI DI
ARAB SAUDI

23

BPKH RAIH MOST IMPACTFUL SHARIA DI
BEST SHARIA AWARDS 2025

27

LOMBOK,
PULAU SERIBU MASJID

30



17

LENSA UMAT



ISEF 2025 JADI AJANG BPKH
PERKUAT EKOSISTEM HAJI
BERKELANJUTAN

21



25

SUKSES MENGELOLA
EKOSISTEM HAJI DAN
UMRAH LEWAT PENDEKATAN
BOUNDARY SPANNING
ORGANIZATION

28

BPKH DAN BMM GELAR OPERASI
KATARAK GRATIS UNTUK 100 WARGA
PANDEGLANG

31

MENGENAL NUSUK: APLIKASI SERBA
GUNA UNTUK JAMAAH



PERKUAT EKOSISTEM HAJI, BPKH DAN DANANTARA JAJAKI KOLABORASI STRATEGIS

Langkah besar untuk memperkuat ekosistem haji sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah tengah digagas bersama oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Pertemuan antara CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan jajaran BPKH pada awal Oktober (2/10) menjadi momentum penting dalam menjajaki sinergi tersebut.

Kolaborasi ini membuka peluang besar, mulai dari pengembangan Kampung Haji Indonesia hingga pengelolaan BPKH Limited di Arab Saudi.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola haji yang lebih efisien dan profesional, tetapi juga menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Danantara Indonesia memproyeksikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dengan luas mencapai 80 hektare, yang diperkirakan mampu menampung hingga 200 ribu jemaah haji dan umrah asal Indonesia. CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan hal tersebut usai menjadi pembicara di Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF)

2025 di Jakarta.

“Luasnya 80 hektare. Pendanaan awal akan ditanggung oleh Danantara, dan tujuan kami adalah menyediakan fasilitas yang nyaman dan layak bagi jemaah Indonesia,” ujar Rosan. Ia menambahkan, proyek strategis ini akan dikembangkan secara kolaboratif bersama berbagai pihak, termasuk BPKH. “Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun,” jelasnya.

Terkait lokasi, Rosan mengungkapkan bahwa lahan untuk proyek ini sudah ditentukan dan kini tengah dalam proses



administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan. "Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendampingi pembangunan Kampung Haji Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor. "Kampung Haji, seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada

Instruksi Presiden yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor," ujarnya.

Fadlul menegaskan bahwa BPKH akan berperan aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan selesai dilakukan oleh Danantara. "Saat ini masih dalam tahap pembahasan lahan, sehingga proses tersebut sepenuhnya menjadi ranah Danantara. Setelah pembelian atau penyewaan tanah selesai, BPKH akan mulai terlibat dalam tahap pembangunan dan pengelolaan," jelasnya.

Proyek strategis ini juga melibatkan sejumlah kementerian

dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Melalui kolaborasi ini, BPKH dan Danantara berkomitmen memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola haji global, tidak hanya sebagai pengirim jemaah terbesar, tetapi juga sebagai negara dengan ekosistem pelayanan haji yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.



UANG MUKA HAJI RP 2,7 TRILIUN: KOMITMEN ATAU TANTANGAN PENGELOLAAN?

Pada pekan lalu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan langkah penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Melalui Forum Dana Haji Internasional (ISEF 2025)

di Jakarta, BPKH secara resmi menyertorkan uang muka senilai Rp 2,7 triliun kepada mitra penyelenggara di Arab Saudi.

Langkah tersebut menandai dimulainya proses pemesanan

layanan haji lebih awal melalui sistem *e-Hajj* yang kini diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sistem baru ini menggantikan pola lama berbasis *muassasah*, dengan menunjuk perusahaan lokal atau syarikah

sebagai penyedia layanan bagi jemaah dari berbagai negara.

Langkah Strategis Sekaligus Ujian Tata Kelola

Bagi Indonesia, pembayaran uang muka ini bukan sekadar transaksi administratif. Tindakan ini merupakan bentuk komitmen agar kuota dan layanan bagi jemaah asal Indonesia dapat terjamin sejak awal. Dengan membayar lebih awal, pemerintah berharap dapat memperoleh lokasi dan fasilitas terbaik di Arafah, Mina, dan Madinah.

Namun di balik langkah tersebut, tersimpan sejumlah tantangan. Pertama, potensi ketidaksesuaian antara jumlah jemaah yang direncanakan dan kapasitas layanan yang telah dipesan. Kedua, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana haji agar publik dapat memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai ketentuan.

Sistem *e-Hajj* memberikan peluang besar bagi peningkatan efisiensi, tetapi juga menuntut kesiapan administrasi dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak Indonesia.

Harapan Jemaah dan Tanggung Jawab Negara

Jemaah haji Indonesia menaruh harapan besar agar langkah awal ini berujung pada peningkatan kualitas

layanan di tanah suci. Tidak hanya terkait akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga menyangkut pelayanan kesehatan, keamanan, dan pembinaan ibadah.

BPKH bersama Kementerian Agama memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan pengelolaan dana haji berjalan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan keadilan. Setiap keputusan keuangan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan jemaah, bukan semata pada target administratif.

Menjaga Kepercayaan Publik

Dana haji merupakan amanah besar. Karena itu, setiap langkah pengelolaan harus disertai dengan keterbukaan informasi dan evaluasi publik yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan adanya audit independen, transparansi laporan penggunaan dana, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga-lembaga kredibel.

Selain itu, koordinasi dengan pihak Arab Saudi perlu dilakukan secara intensif agar seluruh layanan yang telah dipesan benar-benar sesuai dengan standar yang dijanjikan. Klausul perlindungan terhadap perubahan kebijakan atau kondisi luar biasa juga penting untuk menjaga kepastian hak

jemaah.

Pembayaran uang muka sebesar Rp2,7 triliun bukan hanya soal angka, tetapi simbol dari keseriusan Indonesia dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji. Namun komitmen ini harus diikuti dengan kerja nyata yang menjamin kemaslahatan jemaah.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan secara langsung oleh jemaah haji. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola haji tetap terjaga.

Dengan demikian, langkah strategis ini dapat benar-benar menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melayani umat, bukan sekadar catatan di laporan keuangan.





BPKH PERKUAT EKOSISTEM HAJI DAN UMRAH LEWAT KERJA SAMA DENGAN DITJEN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya, BPKH Limited, menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal

Pengembangan Nasional (DPEN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kesepakatan Bersama (MoU) ini berfokus pada fasilitasi ekspor untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia, sekaligus memperkuat peran BPKH dalam membangun ekosistem layanan yang berdaya saing global.

Kerja sama yang ditandatangani oleh Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi, di Jakarta ini menjadi langkah konkret dalam mendorong produk-produk nasional agar mampu memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia di Tanah Suci.

“Kemitraan ini sejalan dengan komitmen

Eksport Nasional (DPEN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kesepakatan Bersama (MoU) ini berfokus pada fasilitasi ekspor untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia, sekaligus memperkuat peran BPKH dalam membangun ekosistem layanan yang berdaya saing global.

BPKH untuk mengembangkan ekosistem haji dan umrah yang mandiri, berdaya saing, dan memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi umat,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Sinergi Penguatan Ekosistem dan Daya Saing Produk Indonesia

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak akan berkolaborasi dalam:

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas, pengembangan produk, dan promosi bagi pelaku usaha berorientasi ekspor.
2. Perluasan jejaring bisnis antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama di sektor yang mendukung kebutuhan haji dan umrah.
3. Pertukaran informasi pasar dan peluang perdagangan agar produk Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar Timur Tengah.

Sinergi ini juga diharapkan membuka peluang ekspor baru bagi UMKM dan industri nasional



yang menyediakan barang dan jasa untuk jemaah haji dan umrah, mulai dari logistik, konsumsi, perlengkapan ibadah, hingga layanan pendukung lainnya.

Langkah Strategis BPKH di Arab Saudi

Sebagai lembaga yang mengelola dana haji dengan prinsip syariah, BPKH terus memperluas kiprahnya secara global melalui BPKH Limited di Arab Saudi. Kerja sama dengan DJPEN merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat nilai kemaslahatan

dan multiplier effect pengelolaan dana haji bagi ekonomi nasional.

“BPKH tidak hanya menjaga amanah pengelolaan keuangan haji dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, tetapi juga berperan aktif dalam membuka peluang ekonomi baru yang bermanfaat bagi umat,” tambah Sidiq Haryono.

Komitmen untuk Kolaborasi Berkelanjutan

Seluruh kegiatan akan dilaksanakan dengan prinsip

koordinasi, efisiensi, dan saling mendukung, tanpa menimbulkan kewajiban finansial yang bersifat mengikat.

Melalui kerja sama ini, BPKH menegaskan komitmennya untuk menghadirkan nilai tambah bagi jemaah dan masyarakat Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri haji dan umrah.

PENYULUH AGAMA: UJUNG TOMBAK PENCERAHAN UMAT, MITRA STRATEGIS BPKH DALAM LITERASI KEAGAMAAN

Di tengah upaya membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya, penyuluhan agama menempati posisi yang sangat strategis. Mereka bukan sekadar penceramah atau pengisi kegiatan keagamaan, tetapi juga agen perubahan sosial, pembimbing umat, dan penghubung masyarakat dengan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Peranan Penyuluhan: Dari Dakwah hingga Pendampingan Umat

Penyuluhan agama merupakan garda terdepan dalam menyampaikan pesan-pesan moral, spiritual, dan sosial kepada masyarakat. Mereka hadir di tengah-tengah umat, membangun wilayah binaan, menjalin silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat, serta menginisiasi berbagai kegiatan pembinaan.

Tugas penyuluhan mencakup empat peran utama; informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif. Mereka tidak hanya menyampaikan ceramah keagamaan, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan sehari-hari, mulai dari konflik keluarga hingga persoalan sosial yang lebih luas.

Di

banyak daerah, penyuluhan juga berperan aktif dalam mencegah paham radikalisme serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama.

Salah satu kontribusi penting penyuluhan agama adalah dalam membangun pemahaman masyarakat tentang ibadah haji. Melalui peran mereka sebagai pendamping rohani, penyuluhan membantu calon jemaah mempersiapkan diri tidak hanya secara ritual, tetapi juga mental dan spiritual.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia



(IPARI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi langkah strategis. Salah satu program yang tengah digagas adalah "Manasik Sepanjang Masa", yaitu pembinaan calon jemaah haji secara berkelanjutan oleh para penyuluhan di daerah. Program ini melengkapi kegiatan manasik resmi pemerintah yang hanya dilaksanakan enam kali, agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk memahami makna dan praktik ibadah haji secara mendalam.

Selain itu, penyuluhan juga diharapkan menjadi mitra penting

BPKH dalam memperkuat literasi keuangan syariah dan literasi haji nasional. Banyak masyarakat yang menjadikan penyuluhan sebagai sumber informasi utama seputar pendaftaran haji, namun belum sepenuhnya memahami bagaimana dana haji dikelola dan dimanfaatkan.

Melalui pelatihan dan sosialisasi bersama BPKH, para penyuluhan dapat menyampaikan informasi yang akurat tentang nilai manfaat, subsidi, serta pengelolaan dana haji kepada masyarakat secara sederhana dan mudah dipahami.

Ke depan, penyuluhan agama diharapkan dapat menjadi corong literasi BPKH di seluruh penjuru Indonesia. Dengan jaringan yang luas hingga tingkat desa, mereka mampu menyampaikan pesan tentang pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan penuh manfaat secara lebih membumi. Melalui sinergi antara BPKH dan IPARI, upaya membangun masyarakat yang paham literasi keagamaan dan keuangan syariah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.



#Semua BisaHaji

BPKH APPS

Kamu udah download BPKH Apps belum?

BPKH APPS

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Cek saldo dan pertumbuhan nilai manfaat kamu hanya di BPKH Apps!

Haji Makin Transparan Dan Mudah

BPKH TEGUHKAN KOMITMEN DANA HAJI AMAN, ADIL, DAN ABADI



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi perhajian nasional melalui pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut disampaikan dalam Kuliah Umum bertajuk “Pengelolaan Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan pada Investasi Surat Berharga BPKH” yang digelar di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan), Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan, serta Rektor UIN Syarif Hidayatullah dan perwakilan Komnas Haji.

Dalam pemaparannya, Indra Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghidupkan kembali jabatan Menteri Haji, posisi yang terakhir kali ada pada era Kabinet Dwikora I tahun 1965 dengan nama Menteri Urusan Haji. Jabatan ini sempat dihapus pada 1966 dan kini, setelah hampir enam dekade, kembali dibentuk pada 2025 sebagai Kementerian Haji dan Umrah. “Artinya, di antara negara-negara Muslim dunia, hanya Presiden

Prabowo dan Indonesia yang memiliki perhatian khusus dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Indra.

BPKH, lanjut Indra, siap bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan dan Wakil Menteri Dahnil Azhar untuk menjawab berbagai persoalan klasik perhajian nasional. “BPKH siap bahu membahu mendukung Kementerian Haji agar tantangan perhajian seperti biaya yang masih tinggi (Rp 89 juta/jemaah pada 2025) dan antrean panjang hingga 25–49 tahun dapat diurai menuju penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih mudah dan terjangkau,” jelasnya.

Indra juga menjelaskan bahwa selama ini BPKH telah memberikan manfaat nyata bagi jemaah. Bagi jemaah yang sudah berangkat, BPKH mampu menekan biaya haji hingga setengah dari total biaya, dengan nilai manfaat lebih dari Rp 40 triliun. Sementara itu, jemaah yang masih menunggu mendapatkan Nilai Manfaat Virtual Account, mirip dividen, dengan total lebih dari Rp 18 triliun.

MEMPERKUAT SINERGI: AUDIENSI BPKH DENGAN KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH INDONESIA



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan audiensi sekaligus courtesy meeting dengan Kementerian Haji dan Umrah Indonesia pada Selasa, 9 September 2025, bertempat di kantor Kementerian Haji dan Umrah Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah beserta jajaran Badan Pelaksana. Agenda tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan memperluas ruang kerja sama di ekosistem haji, khususnya dalam upaya meningkatkan layanan, pengelolaan dana haji, serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Melalui pertemuan ini, BPKH menegaskan komitmennya untuk :

- Mempererat kolaborasi demi peningkatan kualitas layanan haji.
- Memperluas ruang kerja sama dalam ekosistem haji.
- Mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar lebih transparan dan bermanfaat.
- Menjamin keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Setiap langkah yang diambil adalah wujud ikhtiar BPKH untuk menghadirkan pengalaman ibadah haji yang lebih nyaman, aman, dan bermakna bagi seluruh jemaah Indonesia



MOMENTUM BARU PENATAAN HAJI: HARAPAN DI BALIK KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH



Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh pemerintah menandai babak baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), langkah ini bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan, melainkan peluang untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan pengelolaan ibadah haji berjalan semakin tertata.

Harapan Akan Penyelenggaraan yang Lebih Teratur

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyambut positif pembentukan kementerian baru tersebut. Ia menilai bahwa keberadaan Kementerian Haji dan Umrah akan membuat penyelenggaraan haji menjadi lebih fokus dan terkoordinasi dengan baik. Dengan struktur yang lebih jelas, diharapkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji dapat meningkat, baik

dari segi manajemen keuangan maupun pelaksanaan ibadah di tanah suci.

Selama ini, penyelenggaraan haji di Indonesia melibatkan banyak pihak. Kementerian Agama, BPKH, lembaga mitra di Arab Saudi, dan berbagai instansi pendukung lainnya bekerja dalam sistem yang saling berkaitan. Dengan adanya kementerian baru, proses koordinasi diharapkan dapat lebih sederhana dan efisien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.



Menata Sinergi dan Pembagian Tugas

Agar reformasi kelembagaan ini berjalan efektif, perlu ada kejelasan mengenai pembagian fungsi dan tanggung jawab antarinstansi. BPKH memiliki mandat utama dalam pengelolaan dana haji, sedangkan kementerian baru diharapkan berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah di lapangan.

Koordinasi yang baik antara kedua lembaga menjadi kunci agar proses penyediaan



layanan haji, mulai dari pemesanan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga bimbingan ibadah, dapat berjalan lancar. Selain itu, setiap kebijakan perlu dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga publik dapat memantau penggunaan dana haji dengan jelas.

Tantangan Internasional dan Penguatan Diplomasi

Dalam skala global, pengelolaan haji kini menuntut kemampuan diplomasi dan kerja sama internasional yang semakin kuat. BPKH telah berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang membahas pengelolaan dana haji lintas negara. Melalui forum semacam itu, BPKH berharap dapat memperluas kerja sama investasi di bidang layanan haji, khususnya dengan negara-negara ASEAN.

Kehadiran kementerian baru diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi maupun lembaga penyelenggara haji dari negara lain. Sinergi kelembagaan yang kuat akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia di masa mendatang.

Reformasi yang Harus Menyentuh Substansi

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak seharusnya berhenti pada perubahan nomenklatur semata. Reformasi ini harus menyentuh aspek substansial dalam penyelenggaraan haji, mulai dari peningkatan mutu pelayanan hingga efisiensi

pengelolaan dana.

Apabila dijalankan dengan komitmen dan transparansi, kementerian baru ini dapat menjadi titik awal bagi sistem haji yang lebih profesional, akuntabel, dan menenteramkan jemaah. Namun, jika hanya menjadi perubahan administratif tanpa perbaikan nyata, maka yang akan dirugikan adalah para calon tamu Allah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah suci tersebut.

Masyarakat berharap agar seluruh pemangku kepentingan bekerja dengan sinergi, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah. Dengan demikian, penyelenggaraan haji di Indonesia benar-benar menjadi cerminan tata kelola ibadah yang tertib, transparan, dan berkeadilan.



KULIAH UMUM UIN JAKARTA: BPKH RI & KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH DORONG TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN HAJI YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN

Kolaborasi BPKH, Kementerian Haji dan Umrah, serta UIN Jakarta menjadi tonggak penguatan sistem pengelolaan dana dan pelayanan haji yang lebih transparan dan berkeadilan.

Dalam Kuliah Umum Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen untuk tahun 2026 bahwa setiap dana haji akan dikelola lebih efisien agar manfaatnya langsung dirasakan jemaah. Ia menambahkan, mulai 2026 praktik rente akan dihapus sehingga dana kembali kepada jemaah dalam bentuk peningkatan kualitas layanan terbaik di seluruh mata rantai penyelenggaraan haji.

Kolaborasi strategis antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengelola dan pengembang dana haji, dengan Kementerian Haji & Umrah sebagai penyelenggara layanan haji di Tanah Suci, ditegaskan sebagai kunci peningkatan mutu layanan, transparansi, dan keadilan. Mochamad Irfan Yusuf menekankan sinergi peran: BPKH fokus pada pengelolaan keuangan haji yang prudent dan akuntabel, sementara Kementerian Haji & Umrah memastikan penyelenggaraan layanan berjalan efektif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan

jemaah.

Mewakili BPKH, Anggota Badan Pelaksana Indra Gunawan memaparkan berbagai terobosan dalam pengelolaan dana haji berbasis prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. "Melalui kolaborasi yang terarah, BPKH berkomitmen menghadirkan tata kelola dana haji yang modern, akuntabel, dan memberi manfaat luas bagi umat" ujarnya.

BPKH menegaskan bahwa transformasi penyelenggaraan haji akan ditempuh melalui kerja bersama lintas otoritas, penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi publik yang transparan, sehingga manfaat pengelolaan dana haji kian nyata dirasakan jemaah sekaligus menopang keberlanjutan penyelenggaraan haji ke depan.

REVISI UU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI MASUK PROLEGNAS 2025

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji masuk sebagai satu dari 52 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan itu diambil melalui rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 yang digelar di ruang paripurna Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/8/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu mulanya meminta agar Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan untuk menyampaikan laporannya. Setelahnya, Puan menanyakan persetujuan kepada para anggota Dewan yang hadir dan mereka kompak menyetujuinya.

“Apakah perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas tahun 2025 dapat disetujui?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab para peserta rapat.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan lalu Komisi VIII DPR RI juga sempat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI terkait RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara (BPKH) Haji menyampaikan sejumlah masukan.

Masukan yang disampaikan terkait Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan BPKH dalam optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan, efisien dan efektif dalam penyusunan RUU Perubahan atas UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Setidaknya ada dua usulan yang disebutkan oleh Gus Irfan.

Usulan pertama adalah Presiden pernah memberikan instruksi untuk menggabungkan BPKH dengan BP Haji. Pembentukan BP Haji didasarkan pada spesialisasi dan efisiensi.

Pada konteks penyelenggaraan haji, Gus Irfan mengatakan bahwa spesialisasi diartikan BP Haji menjadi otoritas tunggal seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan haji.

Sementara itu, Gus Irfan juga berpendapat bahwa efisiensi tercapai ketika pengelolaan keuangan haji berada di dalam satu lembaga penyelenggaraan haji karena akan ada penyederhanaan proses atau debirokratisasi dan meminimalisir penggunaan biaya operasional yang berasal dari dana haji.

“Saat ini, kami nilai biaya operasional BPKH cukup tinggi. Dengan memasukkannya ke dalam BP Haji, biaya operasional dari dana haji dapat diturunkan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya,” kata Gus Irfan, Selasa (11/3/2025) lalu.

Usulan yang kedua, lanjut pria yang kini menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah itu, BPKH menjadi lembaga sendiri. Tetapi, demi mendukung proses penyelenggaraan haji maka BPKH berada di bawah koordinasi BP Haji dan diperlukan fungsi koordinasi yang kuat dengan BP Haji agar tidak lagi dijumpai birokrasi yang rumit.

Menurut Gus Irfan, kerumitan birokrasi timbul karena terlalu banyaknya pimpinan dan pengawas dalam BPKH sehingga diperlukan struktur organisasi yang lebih sederhana di BPKH.

“Pertimbangan lain adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan haji dimana saat ini portofolio investasi yang dikelola oleh BPKH masih sama dengan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian agama dan persentase nilai manfaat cenderung sama dengan saat dikelola oleh Kementerian Agama,” pungkas Gus Irfan.

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.



Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si. adalah Anggota Badan Pelaksana periode 2017–sekarang. Ia memiliki pengalaman luas di bidang manajemen risiko, hukum, dan Kepatuhan. Ia meraih gelar doktor di Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), gelar magister di Administrasi Kebijakan Bisnis dari Universitas Indonesia, serta gelar sarjana di Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung. Dengan pengalaman luas di sektor perbankan Syariah, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Ia telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan sistem keuangan dan pengelolaan risiko di berbagai institusi di Indonesia.

MENATA ULANG REGULASI DEMI AMANAH UMAT: PANDANGAN ACEP JAYAPRAWIRA SOAL REVISI UU KEUANGAN HAJI

Sejak berdiri pada 2017, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya mengelola dana haji dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta akuntabilitas. Namun, setelah hampir satu dekade berjalan, sejumlah tantangan struktural dan regulasi muncul, mendorong perlunya penyempurnaan payung hukum yang menjadi dasar kerja lembaga ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Acep Jayaprawira, Anggota Badan Pelaksana BPKH memaparkan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurutnya, pembaruan regulasi ini bukan semata kebutuhan administratif, melainkan fondasi penting untuk memastikan pengelolaan dana haji tetap amanah dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Acep menjelaskan bahwa lahirnya UU 34/2014 memang menjadi tonggak penting berdirinya BPKH. Namun, perjalanan waktu menyingkap sejumlah celah yang perlu dibenahi. Salah satunya terkait inkonsistensi istilah dan pengaturan antara UU 34/2014 dengan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Misalnya istilah Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang diatur di UU 8/2019, tapi tidak tercantum dalam UU 34/2014. Padahal dalam praktik, BPKH ikut terlibat dalam pembahasan besaran Bipih bersama Komisi VIII DPR. Ketidaksinkronan ini menimbulkan hambatan operasional,” jelasnya.

Selain itu, usia undang-undang yang sudah lebih dari satu dekade juga membuat banyak hal perlu diperbarui. “Konteksnya sudah berubah, sementara aturan yang menjadi acuan BPKH masih sama seperti saat awal

berdiri,” tambahnya.

Isu lain yang krusial adalah ketiadaan modal awal dalam struktur BPKH. Saat ini, seluruh dana yang dikelola berasal dari setoran jemaah, termasuk untuk investasi langsung. Menurut Acep, hal ini menimbulkan risiko hukum dan keuangan yang besar.

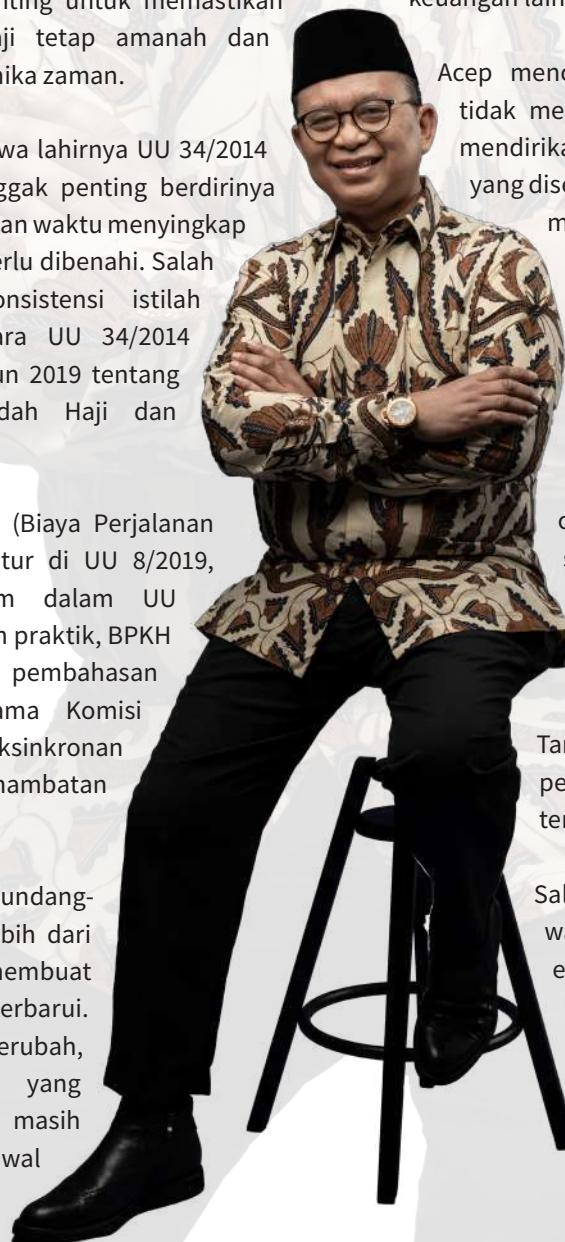
“Kalau investasi itu rugi, sementara sumbernya dari dana setoran awal jemaah, potensi masalahnya bisa sangat serius. Bahkan bisa dianggap merugikan negara. Karena itu, BPKH seharusnya memiliki cadangan modal layaknya BUMN atau lembaga keuangan lain,” tegasnya.

Acep mencontohkan model perbankan: bank tidak menggunakan deposito nasabah untuk mendirikan anak usaha, melainkan dari modal yang disetor pemegang saham. Prinsip serupa, menurutnya, seharusnya diterapkan di BPKH.

Pentingnya Cadangan Kerugian

Selain modal, BPKH juga memerlukan landasan hukum untuk membentuk cadangan kerugian. Dalam praktik bisnis keuangan, cadangan ini mutlak diperlukan sebagai bantalan risiko. “Tidak ada bisnis yang untung terus. Pasti ada risiko kerugian. Karena itu, kita perlu instrumen cadangan agar nilai dana jemaah tetap terlindungi. Tanpa dasar hukum, setiap upaya pencadangan justru bisa dianggap temuan audit,” tutur Acep.

Salah satu isu hangat belakangan adalah wacana penggabungan atau koordinasi erat antara BPKH dengan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Terkait hal ini, Acep menilai bahwa wacana tersebut sah-sah saja sebagai opsi, namun harus ditinjau dari prinsip tata kelola yang baik.



“Kalau kita lihat ke belakang, sebelum ada BPKH berdiri, fungsi haji sepenuhnya ada di Kementerian Agama: sebagai regulator, sebagai operator, sekaligus pengelola keuangan. Semua ada dalam satu tangan. Itu terbukti tidak sehat dalam tata kelola, bahkan menimbulkan masalah hukum pada masa lalu,” ungkapnya.

Menurut Acep, pemisahan fungsi pengelolaan keuangan melalui lahirnya BPKH justru menjadi solusi atas problem tersebut. Karena itu, ia menilai wacana penggabungan harus dipikirkan matang-matang.

“Kalau fungsi itu digabung lagi, resikonya ya kita kembali ke model lama. Bayangkan, ada 178 ribu jemaah per tahun, 250 ribu orang yang terlibat, dan dana puluhan triliun dikelola dalam satu tangan. Itu terlalu besar untuk dikelola tanpa pemisahan peran. Jadi menurut saya, fungsi-fungsi tetap harus berbeda: regulator di satu pihak, operator di pihak lain, dan pengelolaan keuangan di BPKH,” tegasnya.

Acep mengibaratkan perbedaan ini dengan dunia usaha. “Kalau usaha kecil seperti warung atau toko kelontong, wajar semua diatur oleh satu orang: dari modal, jam buka, hingga pengelolaan uang. Tapi ini bukan usaha kecil, ini menyangkut dana haji senilai Rp178 triliun dan melibatkan ratusan ribu jemaah setiap tahun. Kalau tiga fungsi utama itu digabung lagi, risikonya besar sekali,” jelasnya.

Acep menegaskan bahwa BPKH terbuka untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak. “Justru yang kami dorong adalah kolaborasi, bukan penggabungan. Kami ingin memastikan koordinasi tetap kuat, baik dengan Kementerian Haji, Kementerian Agama, maupun lembaga lain seperti OJK, KPK, Kejaksaan, dan Kemenkumham,” ujarnya.

Ia optimistis bahwa dengan pemisahan fungsi yang jelas namun diiringi koordinasi erat, tata kelola justru akan lebih sehat. “Walaupun berbeda atap, insya Allah koordinasi bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu, masing-masing pihak bisa fokus pada perannya, dan pelayanan kepada jemaah tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Acep menegaskan bahwa revisi UU bukan untuk menambah kompleksitas birokrasi, melainkan justru menyederhanakan dan memperkuat tata kelola. Harapannya, dengan regulasi baru, BPKH bisa lebih leluasa mengembangkan investasi langsung, membentuk cadangan modal, serta tetap fokus menjaga nilai manfaat bagi jemaah haji.

“Intinya, BPKH harus bisa menjaga amanah. Revisi ini bukan hanya soal aturan, tapi tentang bagaimana kita memastikan dana haji tetap terlindungi dan dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan umat,” tutupnya.



Nilai Manfaat Tahun 2025 Sudah Didistribusikan!

BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 untuk Jemaah Tunggu



Download BPKH Apps segera!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store





Upacara Sumpah Pemuda



mulai dari kolaborasi strategis dengan dan antara hingga gelaran ISEF 2025





DANA HAJI TERUS BERTUMBUH: TANTANGAN DAN PELUANG MEMPERLUAS INVESTASI EKOSISTEM HAJI GLOBAL

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan bahwa hingga 2025, dana kelolaan haji telah mencapai Rp 171,64 triliun, dengan target bertumbuh menjadi Rp 188,9 triliun pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji tidak lagi sekadar memadai secara kuantitas, melainkan bergerak ke arah kualitas dan dampak yang lebih luas.

Investasi Syariah dan Manfaat Nyata

Jemaah

Sekitar 75,9 persen dari dana haji dialokasikan oleh BPKH untuk

investasi syariah—

melalui surat berharga syariah (sukuk), reksadana, emas, dan investasi langsung. (Humas BPKH) Hingga Agustus 2025, hasil investasi mencapai sekitar Rp 8,10 triliun, meningkat hampir 7 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, Rp 6,39 triliun berasal dari hasil investasi.

Apa artinya bagi jemaah? BPKH menyatakan bahwa hasil investasi ini “tidak berhenti di angka” saja, melainkan dikembalikan dalam bentuk layanan

nyata di lapangan—misalnya pemenuhan



fasilitas haji yang lebih baik, subsidi biaya, dan peningkatan kualitas layanan.

Merambah Ekosistem Haji Global Lewat BPKH Limited

Langkah konkret BPKH dalam memperluas efek investasinya adalah pendirian BPKH Limited di Arab Saudi. Dengan keberadaan entitas ini, BPKH bisa berinvestasi langsung di sektor-sektor strategis dalam ekosistem haji, seperti perhotelan, transportasi, katering, dan properti.

Beberapa pencapaian dalam musim haji 2025 mencakup:

1. Pengamanan 9 hotel berkualitas (8 di Makkah, 1 di Madinah).
2. Penyediaan 475 ton rempah khas Nusantara untuk konsumsi jemaah.
3. Penyaluran makanan siap saji di enam waktu penting selama ibadah.
4. Kolaborasi dengan UMKM Indonesia untuk memasok produk lokal di area hotel dan pasar Tanah Suci.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa BPKH tidak hanya membiayai secara pasif, melainkan ikut berperan aktif dalam menjembatani ekonomi umat di tanah air dan tanah suci.

Dilandasi Empat Pilar Amanah

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan bahwa seluruh strategi investasi dan pengelolaan keuangan haji berjalan berdasarkan empat pilar amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014:

- Memaksimalkan manfaat bagi jemaah haji
- Meningkatkan layanan ibadah melalui hasil investasi
- Menjamin efisiensi dan transparansi
- Memberi nilai tambah bagi kesejahteraan umat di dalam negeri

Dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola syariah, BPKH menempatkan Indonesia sebagai acuan global dalam pengelolaan dana haji.

Harus Diimbangi dengan Pengawasan dan Keberlanjutan

Meskipun capaian BPKH patut diapresiasi, dorongan memperluas investasi ke ekosistem haji global membawa sejumlah tantangan dan risiko.

Pertama, investasi langsung di sektor layanan di Arab Saudi harus dijalankan dengan sangat teliti agar tidak menjadi rongsokan modal apabila regulasi atau pasar berubah drastis.

Kedua, keterlibatan langsung dalam bisnis perhotelan, katering, atau properti rentan terhadap persaingan lokal dan fluktuasi sektor real estat.

Ketiga, agar kepercayaan publik tetap terjaga, BPKH harus menyediakan laporan terbuka dan audit independen yang benar-benar transparan, terutama terkait pendapatan investasi, alokasi kembali ke jemaah, dan biaya operasional BPKH Limited.

Keempat, keberlanjutan strategi investasi mesti menjaga keseimbangan antara likuiditas untuk kebutuhan haji jangka pendek dan pertumbuhan untuk manfaat jangka panjang. Bila dana terlalu diikat dalam investasi yang lambat likuiditasnya, dikhawatirkan ketersediaan dana untuk mendukung operasional haji bisa terganggu.

Menyatukan Ambisi dan Kewaspadaan

Pertumbuhan dana haji yang signifikan dan langkah memperluas investasi ke ekosistem global menunjukkan bahwa BPKH ingin melangkah ke level yang lebih strategis. Bukan hanya mengelola dana, tapi juga menjadi pemain dalam layanan haji global, menyediakan nilai tambah yang nyata kepada jemaah.

Namun ambisi sebesar itu harus diimbangi dengan komitmen terhadap akuntabilitas, pengawasan intensif, dan manajemen risiko profesional. Keberhasilan agenda ini akan diukur bukan pada besarnya portofolio investasi, tetapi pada seberapa besar jemaah merasakan kebermanfaatannya secara langsung: kenyamanan selama ibadah, subsidi yang adil, dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola haji.



ISEF 2025 JADI AJANG BPKH PERKUAT EKOSISTEM HAJI BERKELANJUTAN

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 kembali menjadi panggung penting bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memperkuat transparansi serta memperluas kerja sama global dalam pengelolaan dana haji. Tidak sekadar hadir, BPKH memanfaatkan momentum ini dengan menggelar forum internasional yang membahas tata kelola keuangan haji sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapan finansial dan spiritual dalam beribadah.

Acara berlangsung di JIExpo Convention Center, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, melalui forum bertajuk The 7th International Hajj Fund Forum dengan tema "Membangun Ekosistem Haji dan Umrah yang Berkelanjutan Secara Spiritual dan Ekonomi."

Forum ini menghadirkan

sejumlah pakar internasional, di antaranya Datuk Mohamed Ameen Abdul Wahab dari Lembaga Tabung Haji Malaysia serta Abdul Wahab Soomro dari Pakistan Hajj Mission. Kehadiran kedua tokoh tersebut memperkaya diskusi, mengingat pengalaman panjang negara mereka dalam pengelolaan dana haji di tingkat global.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, dan dipandu oleh pakar ekonomi syariah terkemuka, Prof. Syafi'i Antonio. Kolaborasi berbagai pihak ini menunjukkan komitmen BPKH untuk mendorong tata kelola dana haji yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Arah Baru Pengelolaan Dana Haji

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi global dalam tata kelola keuangan haji yang transparan dan berkelanjutan.



“Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama global dalam pengelolaan keuangan haji. Kami ingin memastikan dana haji tidak hanya aman, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi umat,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, BPKH menegaskan arah baru pengelolaan dana haji yang tidak hanya berfokus pada keamanan finansial, tetapi juga membangun ekosistem haji dan umrah yang mencakup aspek ekonomi serta spiritual. Kehadiran narasumber dan peserta internasional mempertegas bahwa pengelolaan dana haji adalah isu global yang menuntut kolaborasi lintas negara agar sistem yang terbangun semakin kuat dan transparan.

Edukasi Publik Lewat Talkshow

Selain forum internasional, BPKH juga menghadirkan program yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu talkshow bertajuk “Hijrah dan Hikmah Haji: Meraih Ketenangan Hidup dan Kuat Finansial.”



Talkshow ini menghadirkan figur publik seperti Meisya Siregar dan Ingrid Kansil, bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah. Diskusi dipandu oleh Ari Untung yang menghadirkan suasana interaktif dan inspiratif.

Fadlul menegaskan bahwa persiapan berhaji tidak hanya terkait dana, tetapi juga kesiapan hati. “Persiapan haji adalah perjalanan hati dan finansial. Melalui talkshow ini, kami ingin mengajak masyarakat mempersiapkan diri secara menyeluruh agar ibadah menjadi lebih bermakna,” jelasnya.

Ia menambahkan, perencanaan keuangan yang matang menjadi fondasi penting agar calon jemaah haji dapat beribadah dengan tenang tanpa beban finansial, sehingga dapat lebih fokus pada aspek spiritual.

Peran Edukatif BPKH di ISEF 2025

Selama ISEF 2025 yang berlangsung pada 8-12 Oktober, BPKH menghadirkan booth edukatif di JIExpo Convention Center. Booth tersebut menjadi sarana interaktif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dana haji, melakukan konsultasi keuangan, serta mencoba BPKH Apps yang menampilkan data transparansi pengelolaan dana.

Langkah ini menegaskan komitmen BPKH untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Transparansi diyakini menjadi kunci agar masyarakat merasa tenang dan yakin bahwa dana haji dikelola dengan aman, profesional, dan memberi manfaat luas.

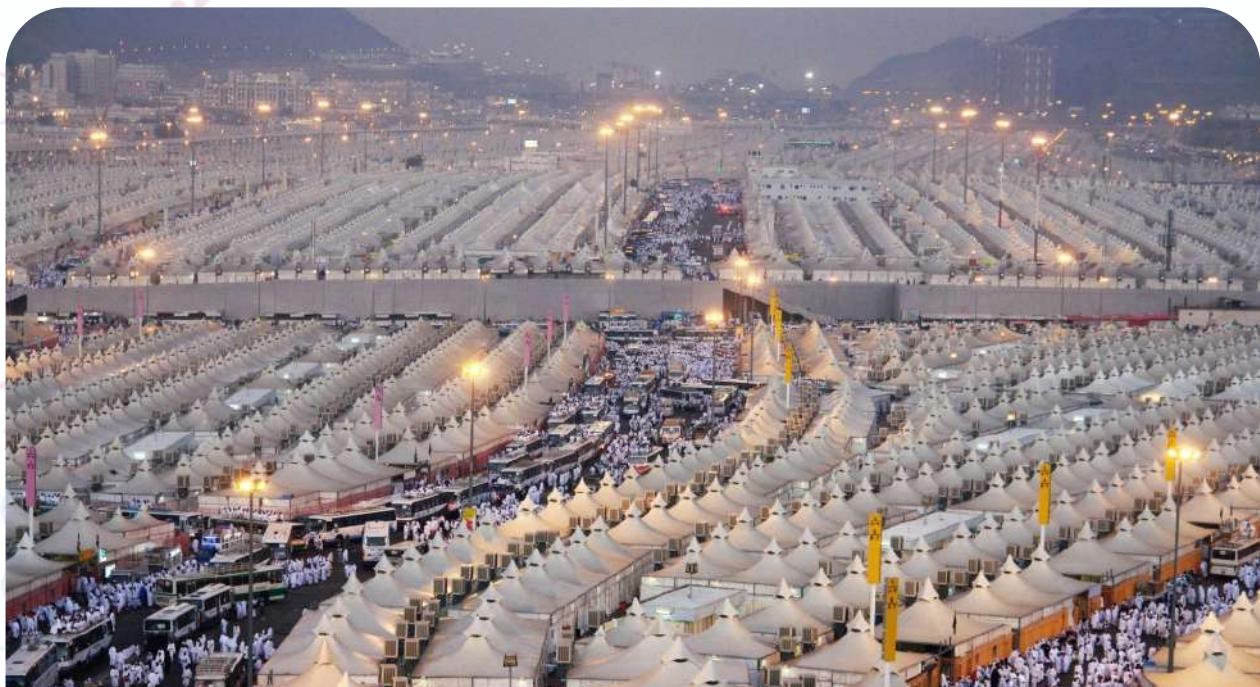
Menuju Ekosistem Haji yang Berkelanjutan

Rangkaian kegiatan BPKH di ISEF 2025 memperlihatkan transformasi lembaga ini sebagai pengelola keuangan sekaligus motor penggerak ekosistem haji modern. Konsep keberlanjutan yang diusung tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai spiritualitas sebagai inti dari ibadah haji.

Dengan menggabungkan aspek finansial dan spiritual, BPKH berupaya memastikan umat Islam Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tanpa beban finansial, sementara dana yang dikelola turut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

ISEF 2025 menjadi momentum penting bagi BPKH untuk menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan dana haji yang amanah, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui forum internasional dan talkshow edukatif, BPKH menempatkan diri bukan sekadar sebagai lembaga pengelola keuangan, melainkan mitra strategis umat dalam menyiapkan perjalanan haji yang tenang dan penuh makna.





BPKH PASTIKAN KAWAL DANANTARA DALAM PEMBIAYAAN KAMPUNG HAJI DI ARAB SAUDI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan akan mendampingi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam pengelolaan pembiayaan proyek Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Proyek berskala besar ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) yang menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem pelayanan haji Indonesia di tanah suci.

Sinergi Lintas Lembaga di Bawah Amanat Presiden

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam tahap pembangunan dan pengelolaan Kampung Haji setelah proses pembelian atau penyewaan lahan diselesaikan oleh Danantara. "Karena sekarang ini masih bicara tanah, itu memang masih ranahnya di Danantara.



Nanti setelah tim mereka menyelesaikan semua proses dari sisi pembelian atau penyewaan tanah, baru kami akan bergerak," ujar Fadlul di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar kementerian dan lembaga merupakan perintah langsung dari Inpres terkait pembangunan Kampung Haji. Dalam Inpres tersebut, Danantara ditunjuk sebagai pimpinan proyek, sementara Kementerian Haji menjadi pengguna utama fasilitas.

"Kolaborasi ini antara Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai user, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai tugas dan fungsinya. Sementara BPKH menjadi pendamping dari Danantara dan berkontribusi

dalam pembiayaan serta pembangunan Kampung Haji,” jelas Fadlul.

Peran Strategis BPKH dan Peluang Kolaborasi

Fadlul mengungkapkan bahwa BPKH telah menjalin komunikasi formal dengan Danantara untuk membahas bentuk kolaborasi yang bisa dijalankan. Ia juga menyampaikan kesiapan BPKH untuk berkontribusi melalui anak usahanya, BPKH Limited, yang berbasis di Arab Saudi. “Prinsipnya kami terbuka. Jika BPKH Limited dapat digunakan sebagai dasar kerja sama dengan Kementerian Haji atau dalam pembangunan Kampung Haji dalam bentuk apa pun, kami sangat menyambut baik,” ujarnya.

Menurut Fadlul, pelibatan BPKH dalam proyek ini penting agar seluruh tahapan investasi dan pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, syariah, dan tata kelola yang baik. Keterlibatan lembaga ini juga diharapkan dapat memastikan agar dana umat yang dikelola tetap aman sekaligus memberikan manfaat bagi jemaah haji Indonesia.

Pendanaan Awal Ditanggung oleh Danantara

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa seluruh pendanaan tahap awal proyek Kampung Haji akan ditanggung sepenuhnya oleh Danantara. Namun, pada tahap berikutnya, pihaknya akan bekerja sama dengan BPKH dalam pembiayaan pembangunan.

“Kalau pendanaan tidak ada masalah, karena ada Danantara. Untuk awal, semuanya ditanggung penuh oleh kami. Nanti pembangunan tahap selanjutnya akan kolaborasi dengan BPKH, karena banyak hal yang harus dibangun,” kata Rosan. Meski demikian, ia belum menyebutkan perkiraan nilai investasi proyek karena masih dalam tahap perhitungan. “Ini

masih proses hitung-hitungannya, jadi belum bisa disebutkan,” ujarnya.

Rosan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan proses perolehan lahan berjalan lancar. Ia menyadari bahwa kepemilikan atau pengelolaan lahan oleh pihak asing di Arab Saudi merupakan hal baru yang membutuhkan waktu dan penyesuaian regulasi. “Kita mungkin bicara dapat tanahnya dulu. Karena perjalanan ini tentu butuh waktu. Dari pihak mereka juga menyampaikan, ini hal yang baru, di mana asing boleh memiliki lahan. Jadi kita jalani langkah demi langkah, yang penting dapat lahannya dulu,” jelasnya.

Langkah Strategis Menuju Ekosistem Haji Terpadu

Proyek Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi diharapkan menjadi pusat kegiatan dan layanan bagi jemaah Indonesia, mulai dari akomodasi, pusat logistik, hingga fasilitas pembinaan dan pelayanan terpadu. Dengan dukungan BPKH, proyek ini juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha Indonesia melalui rantai pasok dan investasi syariah yang berkelanjutan.

Keterlibatan BPKH dalam pembiayaan dan pengawasan akan menjadi kunci agar proyek ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mencerminkan nilai transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat.

Kampung Haji Indonesia diharapkan menjadi simbol kemandirian dan kebanggaan nasional dalam melayani jemaah di tanah suci, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem global penyelenggaraan haji.



SUKSES MENGELOLA EKOSISTEM HAJI DAN UMRAH LEWAT PENDEKATAN BOUNDARY SPANNING ORGANIZATION

Pengelolaan dana haji bukan sekadar menjaga angka di atas kertas, tetapi memastikan setiap rupiah menjadi manfaat nyata bagi umat.

Oleh: Dr. Aziz Fajar Ariwibowo, S.T., M.A.B

Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya
BPKH, Anggota Indonesia Strategic Management Society (ISMS)

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini mengelola dana haji dengan nilai yang sangat besar. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH) Tahun 2024 Audited, total dana yang dikelola BPKH telah mencapai Rp171,64 triliun.

Dari jumlah itu, Rp40,76 triliun atau 23,75 persen ditempatkan dalam produk perbankan syariah. Sementara Rp130,88 triliun atau 76,25 persen diinvestasikan dalam surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Dana tersebut bersumber dari setoran awal calon jemaah haji yang masih menunggu keberangkatan, dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Fungsi dan Mandat BPKH

Pengelolaan keuangan haji diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, dengan biaya yang rasional, efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam.

Regulasi lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, yang menjadi dasar pembentukan BPKH.

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik dalam skala besar, BPKH tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dana dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memastikan ekosistem haji

dan umrah dapat terintegrasi dengan baik.

BPKH Sebagai Boundary Spanning Organization

Dalam teori organisasi, entitas seperti BPKH dapat dikategorikan sebagai *Boundary Spanning Organization* (BSO), yaitu lembaga yang berperan menjembatani berbagai pihak di dalam dan luar sistemnya.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Tushman (1977), dan dijelaskan lebih lanjut oleh Aldrich, Herker, serta Williams, yang memandang BSO sebagai organisasi yang menembus batas birokrasi untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan lingkungan eksternal.

BPKH memerlukan fungsi ini dengan menghubungkan beragam pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Agama, Komisi VIII DPR RI,



Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), YLKI, asosiasi pelaksana ibadah haji dan umrah, lembaga keuangan syariah, hingga organisasi masyarakat Islam dan para jemaah sendiri.

Membangun Ekosistem yang Terintegrasi

Dalam konteks global, BPKH berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan otoritas di Arab Saudi, seperti Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Investasi, dan sejumlah syarikah yang menangani akomodasi dan logistik.

Kerja sama lintas negara ini mencerminkan posisi BPKH sebagai penghubung lintas batas budaya, institusi, dan sistem ekonomi. Pendekatan ini penting untuk memastikan layanan haji dan umrah Indonesia berjalan efisien, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah.

Investasi BPKH kini juga diarahkan untuk memperkuat sektor riil, seperti penyediaan layanan akomodasi, transportasi, fasilitas kesehatan, dan layanan keuangan bagi jemaah haji dan umrah, baik di Indonesia maupun di Tanah Suci.

Empat Fungsi Strategis BPKH

Dalam pendekatan boundary spanning, menurut Ancona dan Caldwell, terdapat empat fungsi utama yang menjadi acuan lembaga seperti BPKH, yaitu:

1. Fungsi *ambassadorial*, mewakili kepentingan jemaah dalam membangun kemitraan lintas batas.
2. Fungsi *task coordinator*, memastikan layanan haji berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai ketentuan syariah.
3. Fungsi *scout*, menggali informasi strategis dan peluang investasi dari lingkungan global.
4. Fungsi *guard*, menjaga keamanan informasi dan stabilitas reputasi lembaga.

Implementasi keempat fungsi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji, memperkuat efisiensi operasional, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap BPKH.

Menjaga Independensi dan Tata Kelola

Independensi menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi. BPKH harus mampu mengambil langkah strategis jangka panjang, termasuk investasi yang mungkin tidak langsung menghasilkan keuntungan besar, tetapi berdampak menurunkan biaya perjalanan haji dan umrah di masa mendatang.

Penerapan tata kelola yang kuat, dukungan sumber daya manusia profesional, dan sistem teknologi informasi yang transparan menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas BPKH di mata publik.

Dampak dan Arah ke Depan

Sebagai pengelola dana umat, BPKH kini bergerak dari sekadar lembaga keuangan menuju penggerak ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan. Melalui investasi dan kolaborasi lintas sektor, BPKH berperan dalam mendorong pertumbuhan industri halal, layanan kesehatan, transportasi, logistik, serta teknologi informasi yang mendukung kegiatan ibadah haji dan umrah.

Ke depan, tantangan terbesar BPKH adalah menjaga stabilitas investasi di tengah dinamika ekonomi global, memperkuat transparansi, dan memastikan manfaat ekonomi dapat kembali ke umat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan ibadah.

Dengan tata kelola yang kuat, strategi investasi yang hati-hati, dan kolaborasi lintas sektor yang terukur, BPKH memiliki peluang besar untuk menjadi model lembaga pengelola dana publik syariah yang sukses di tingkat global.





BPKH RAIH MOST IMPACTFUL SHARIA DI BEST SHARIA AWARDS 2025

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) meraih penghargaan Best Sharia Awards 2025 yang diselenggarakan investortrust.id dan Invofesta. Dalam ajang tersebut, BPKH berhasil menyabet penghargaan dalam kategori Most Impactful Sharia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai, penghargaan tersebut dijadikan sebuah motivasi dan dorongan untuk terus menghasilkan kinerja yang positif dalam pengelolaan keuangan haji.

“Ini merupakan kunci bagi kami untuk dapat lebih mengembangkan kelolaan kami dalam keuangan haji, sehingga dapat bermanfaat bagi calon jemaah haji Indonesia dan dapat memberikan dampak kepada keuangan syariah di Indonesia,” ucap Fadlul kepada Investortrust.id usai menerima penghargaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, Fadlul berharap, industri keuangan syariah di

dalam negeri dalam terus berkembang dengan berbagai macam motivasi dan memberikan kontribusi untuk dapat meningkatkan, dan mengoptimalkan nilai manfaat keuangan yang dikelola BPKH.

“Kami berharap agar teman-teman yang ada di industri ini bisa memberikan kontribusi dalam bentuk inovasi-inovasi yang sangat baik, agar dapat membantu kami untuk bisa meningkatkan dan mengoptimalkan nilai manfaat atau hasil investasi yang kami kelola saat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fadlul menilai, pengembangan-pengembangan inovasi di industri keuangan syariah sangat penting. Apalagi, menurutnya, para investor di dalam negeri memerlukan terobosan-terobosan yang lebih baik.

“Sehingga tentu saja akan ada hal-hal yang lebih baik dan inovatif bagi pengembangan tidak hanya dana keuangan haji tapi juga dana umat musim di Indonesia,” ungkap Fadlul.





BPKH DAN BMM GELAR OPERASI KATARAK GRATIS UNTUK 100 WARGA PANDEGLANG

Bagi sebagian orang, menikmati keindahan dunia mungkin terasa sederhana. Namun bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan dan kehilangan penglihatan akibat katarak, kesempatan untuk melihat kembali adalah anugerah yang tak ternilai.

Semangat inilah yang melatarbelakangi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Baitulmal Muamalat (BMM) dalam menggelar Operasi Katarak Gratis bagi masyarakat dhuafa di Pandeglang, Banten. Kegiatan yang digelar di Klinik Utama Mata Saruni pada Senin (22/9) ini berhasil membantu 100 penerima manfaat mendapatkan kembali penglihatannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sulistiyawati, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Jahidin Zey, Kepala Divisi Kemaslahatan BMM, dr. Darmawan M. Sophian, Sp.M(K), Pemilik Klinik Utama Mata Saruni, serta Dr. R.

“BPKH berkomitmen menghadirkan manfaat dari dana umat, salah satunya melalui program kesehatan seperti operasi katarak gratis. Kami ingin memastikan nilai manfaat Dana Abadi Umat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,”

— Sulistiyawati, Anggota Badan Pelaksana BPKH

Donny M. Iskandar, SE, ME Ketua Yayasan Bhakti Muamalat Indonesia.

Program operasi katarak ini merupakan bagian dari penyaluran nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH untuk kegiatan kemaslahatan. Mengusung tagline “Bersama Wujudkan Indahnya Melihat Dunia”, kegiatan ini diharapkan mampu mengembalikan senyum dan harapan bagi para penerima manfaat yang selama ini terbatas oleh kondisi penglihatan.



Sebelumnya, BPKH telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Bandung, Malang, Tulungagung, dan Blitar, masing-masing dengan 100 penerima manfaat. Keberlanjutan program ini menjadi bukti komitmen BPKH untuk terus memperluas jangkauan manfaat dana umat di berbagai daerah di Indonesia.

Setiap pasien yang mengikuti program ini melewati



proses ketat dan profesional, mulai dari skrining awal, tindakan operasi, hingga kontrol pascaoperasi. Prosedur ini memastikan operasi berjalan aman dan memberikan hasil optimal bagi pasien.

“Harapannya, setelah operasi, para penerima manfaat dapat kembali melihat dengan jelas dan menikmati kehidupan yang lebih berkualitas,” ujar dr. Darmawan M. Sophian, Sp.M(K), pemilik Klinik Utama Mata Saruni

Antusiasme masyarakat terlihat jelas sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak dari penerima manfaat yang sebelumnya tak memiliki akses untuk berobat karena kendala biaya, kini dapat melihat kembali wajah keluarga dan lingkungan sekitar mereka dengan penuh rasa syukur.

Dukungan juga datang dari berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pandeglang, dan BAZNAS Provinsi Banten yang turut menyalurkan paket sembako bagi para penerima manfaat.

Menurut data Kementerian Kesehatan, katarak merupakan penyebab utama kebutaan di Indonesia dengan angka mencapai 81%. Melalui kegiatan ini, BPKH dan BMM berharap dapat membantu menekan angka kebutaan tersebut, khususnya di kalangan

masyarakat kurang mampu.

Kini, ratusan pasien di Pandeglang telah terbebas dari katarak dan dapat menatap dunia dengan harapan baru. Lebih dari sekadar kegiatan sosial, program ini menjadi wujud nyata pengelolaan dana umat yang berdampak langsung dan berkelanjutan.

“Ratusan pasien kini terbebas dari katarak. Semoga kegiatan bakti sosial seperti ini terus berlanjut demi keberlangsungan hidup dan penglihatan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Sulistyowati.

Dengan semangat kolaborasi dan kemaslahatan, BPKH terus mengukuhkan perannya sebagai lembaga pengelola dana umat yang amanah, profesional, dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat luas.



LOMBOK, PULAU SERIBU MASJID

Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat sejak lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Alamnya yang indah, mulai dari pantai berpasir putih, laut biru jernih, hingga perbukitan hijau yang menawan, menjadi daya tarik utama. Namun, Lombok bukan hanya tentang panorama alamnya. Pulau ini memiliki keunikan budaya dan religiusitas yang membuatnya istimewa: julukan “Pulau Seribu Masjid.”

Julukan ini bukan sekadar ungkapan, tapi didukung oleh data yang tercatat. Taufan Hidjaz, putra daerah Lombok yang juga seorang akademisi, mencatat bahwa terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil tersebar di 518 desa di Lombok.¹

Jika dihitung secara keseluruhan, Lombok memiliki lebih dari 9.000 masjid, baik berukuran kecil maupun besar. Angka tersebut menegaskan betapa eratnya kehidupan masyarakat Lombok dengan masjid, sehingga wajar jika pulau ini disebut sebagai Pulau Seribu Masjid.²

Keberadaan ribuan masjid ini tidak lepas dari sejarah dan keyakinan masyarakat Sasak yang mayoritas memeluk agama Islam. Bagi masyarakat Sasak, masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Masjid hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Arsitektur masjid di Lombok pun memiliki keunikan

tersendiri. Banyak di antaranya memadukan unsur tradisional Sasak dengan sentuhan modern. Hal ini menciptakan kekhasan visual sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain menawarkan destinasi alam yang memikat, Lombok juga menyajikan pengalaman religius yang mengesankan. Para wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat merasakan atmosfer spiritual yang kuat. Masjid-masjid yang berdiri megah maupun sederhana menjadi saksi hidup dari religiusitas masyarakat Lombok.

Bagi umat Islam Indonesia, Lombok memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah masyarakat mampu menjaga ketaatan sekaligus merawat kebudayaan. Dengan sebutan Pulau Seribu Masjid, Lombok bukan hanya destinasi wisata, melainkan juga potret kekayaan spiritual bangsa.

1. “Mengapa Lombok Disebut Sebagai Pulau Seribu Masjid,” Oleh Oleh Khas Lombok. Diakses dari: <https://oleholehkhlaslombok.net/lombokpulauseribumasjid/>

2. “Asal Muasal Julukan Lombok Pulau Seribu Masjid, Dilontarkan Spontan Perwakilan Kemenag Tahun 1970.” Lombok Post. Diakses dari: <https://lombokpost.jawapos.com/sejarah/1505325683/asal-muasal-julukan-lombok-p>



MENGENAL NUSUK: APLIKASI SERBA GUNA UNTUK JAMAAH

Di era digital, kemudahan dalam beribadah kini tidak hanya hadir di Tanah Air, tetapi juga telah menjangkau Tanah Suci. Salah satu inovasi terbaru dari Pemerintah Arab Saudi yang mendukung hal tersebut adalah Nusuk, aplikasi dan platform digital resmi yang dirancang untuk memudahkan jamaah haji dan umrah dari seluruh dunia.

Nusuk dikembangkan di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai bagian dari implementasi Saudi Vision 2030, sebuah rencana strategis nasional yang diluncurkan pada tahun 2016 untuk mentransformasi ekonomi Arab Saudi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak, memperluas sektor-sektor baru seperti pariwisata dan teknologi, serta memberdayakan masyarakat melalui

reformasi sosial dan ekonomi. Visi besar ini berlandaskan pada tiga pilar utama: masyarakat yang dinamis, ekonomi yang berkembang, dan bangsa yang ambisius.

Nusuk hadir sebagai aplikasi serba guna yang mengintegrasikan seluruh layanan perjalanan ibadah dalam satu platform digital yang mudah digunakan. Melalui Nusuk, jamaah dapat mengurus seluruh keperluan perjalanan umrah dan haji tanpa perlu berpindah aplikasi atau bergantung pada pihak ketiga. Proses pengajuan visa umrah dapat dilakukan secara daring dengan langkah-langkah yang sederhana, cepat, dan transparan. Jamaah juga memiliki kebebasan untuk memilih paket perjalanan yang sesuai dengan



empat negara dengan pengguna Nusuk terbanyak di dunia.

Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme jamaah Indonesia dalam memanfaatkan kemudahan digital untuk memperlancar ibadah di Tanah Suci, sekaligus menandai semakin kuatnya peran teknologi dalam mendukung pelayanan haji dan umrah yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Tidak hanya memfasilitasi kebutuhan teknis perjalanan, Nusuk juga memperkaya pengalaman spiritual jamaah. Melalui fitur “Umrah Guides”, pengguna bisa mempelajari tahapan ibadah umrah secara interaktif. Sementara fitur “Visiting Rawdah” membantu jamaah mendapatkan izin masuk ke Raudhah, area di Masjid Nabawi yang disebut Rasulullah sebagai taman surga.

Aplikasi ini juga memuat informasi wisata religi dan budaya, memungkinkan jamaah untuk “Discover the Two Holy Mosques”, menjelajahi sejarah Nabi Muhammad serta destinasi bersejarah lainnya yang penuh makna.

Peluncuran Nusuk menandai langkah nyata Arab Saudi dalam mewujudkan salah satu pilar Vision 2030, yakni “Serving the Guests of Allah”. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Kerajaan berkomitmen meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi jutaan umat Islam yang datang untuk beribadah setiap tahun.

Bagi jamaah asal Indonesia, kehadiran Nusuk adalah bukti nyata bagaimana inovasi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih mudah dan terorganisir.



kebutuhan dan anggaran masing-masing.

Lebih jauh, Nusuk mempermudah jamaah dalam memesan akomodasi, transportasi, hingga tur lokal di dua kota suci, Makkah dan Madinah, dengan jaminan layanan resmi dan terpercaya. Aplikasi ini juga menyediakan panduan langkah demi langkah dalam pelaksanaan ibadah, mulai dari tata cara ihram, thawaf, sa'i, hingga ziarah ke tempat-tempat bersejarah.

Aplikasi ini juga menyediakan fitur “Shop Umrah Essentials”, di mana jamaah dapat membeli perlengkapan ihram dan suvenir khas Tanah Suci, serta fitur “Muslim’s Zad” yang berisi panduan harian ibadah seperti jadwal salat, arah kiblat, dan bacaan Al-Qur'an.

Menariknya, Nusuk dapat digunakan tanpa paket data (data bundle) di seluruh jaringan seluler Arab Saudi, serta tersedia dalam lima bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, Nusuk mencatat perkembangan luar biasa dengan lebih dari 30 juta izin umrah dan kunjungan ke Masjid Nabawi yang diterbitkan melalui aplikasi ini tumbuh lebih dari 1.162 persen sejak awal tahun. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu dari



Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940